



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi Ditargetkan Mulai Dibangun Akhir 2026
Tanggal : Senin, 13 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : -

Secara garis waktu, Tol Sicincin-Bukittinggi ditargetkan mulai dibangun akhir 2026. Pembebasan lahan jadi kunci dalam proyek senilai hampir Rp 30 triliun ini.

Oleh Yola Sastra

PADANG, KOMPAS — Pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi sepanjang sekitar 41 kilometer sedang dalam tahap penyusunan desain dan diharapkan segera dimulai akhir 2026. Pembebasan lahan menjadi kunci dalam kelancaran proyek senilai hampir Rp 30 triliun ini.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, di Padang, Senin (13/4/2026), mengatakan, BPJN Sumbar dibantu PT Utama Karya sedang menyusun desain dasar (basic design) dan desain teknik rinci (detail engineering design/DED) untuk Jal Tol Sicincin-Bukittinggi.

"Hari Senin ini ada survei untuk pendetailan trase yang sedang disiapkan," ujar pria yang karib disapa Andi ini ketika dijumpai di kantornya, Senin.

Andi menjelaskan, setelah desain dasar dan DED selesai, proses selanjutnya akan masuk pada tahap penetapan lokasi dan pembebasan lahan. Setidaknya butuh 60 persen lahan yang telah bebas untuk dapat dimulai pekerjaan konstruksi.

Tol Sicincin-Bukittinggi akan memiliki panjang sekitar 41,25 kilometer. Jalan yang merupakan sambungan dari Tol Padang-Sicincin ini terbentang di lima kabupaten/kota, yaitu Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, dan Bukittinggi.

Menurut Andi, pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi akan dibagi atas dua segmen, yaitu Sicincin-Padang Panjang 21,20 kilometer dan Padang Panjang-Bukittinggi 20,05 kilometer. "Anggarannya diperkirakan hampir Rp 30 triliun," lanjutnya.

Tol Sicincin-Bukittinggi, kata Andi, juga akan melintasi Pegunungan Bukit Barisan di sekitar kawasan Lembah Anai. Dengan demikian, setidaknya ada dua terowongan yang akan dibangun sepanjang ratusan meter hingga beberapa kilometer di Padang Pariaman dan Tanah Datar. "Kepastiannya nanti berdasarkan hasil final DED," ucapnya.

Andi menambahkan, secara garis waktu (time line), proyek Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan dapat dimulai akhir 2026. Adapun target selesai atau jalan dapat dioperasikan ialah pada 2029 untuk segmen Padang Panjang-Bukittinggi dan 2031 untuk segmen Sicincin-Padang Panjang.

"Namun, target tersebut tergantung pada kesiapan lahan yang bebas," kata Andi, yang berharap dukungan masyarakat dan seluruh unsur pemerintah daerah untuk membantu pembebasan lahan sehingga pembangunan tol dapat berjalan lancar.

Andi menilai, keberadaan ruas Tol Sicincin-Bukittinggi yang merupakan bagian dari Tol Padang-Pekanbaru dan sirip dari Tol Trans-Sumatera akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Sumbar. Akses masyarakat, termasuk wisatawan, untuk rute Padang-Bukittinggi akan lebih mudah dan cepat.

Andi memperkirakan, waktu tempuh Padang-Bukittinggi yang biasanya sekitar 3 jam dapat dipangkas menjadi 2 jam dengan tersambungannya Tol Padang-Sicincin dan Sicincin-Bukittinggi. Tingkat keamanan dan kepastian perjalanan jalan tol ini juga lebih tinggi dibandingkan jalan biasa.

"Dengan adanya tol ini, orang yang datang ke Padang jika ingin wisata kuliner ke Bukittinggi lebih gampang. Orang bisa PP

(pergi-pulang) lewat tol. Kalau lewat jalan nasional, ada risiko macet, belum lagi risiko curah hujan tinggi, ada jalan tertutup longsor, dan lainnya,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Zefnihan mengatakan, Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar dan para kepala daerah telah menjalankan rapat pendahuluan untuk pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi di Padang, Kamis (9/4/2026).

“Forkopimda Provinsi Sumbar berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan serta menjadikan pembangunan tol ini bermanfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang tanahnya terkena jalan tol ini,” ujar Zefnihan.

Menurut Zefnihan, sejauh ini, Tol Padang-Sicincin sepanjang 36,6 kilometer belum maksimal dilalui oleh pengendara. Sebab, lintasannya relatif pendek dan hanya ada dua pintu tol, yaitu di Jalan Bypass, Kota Padang, dan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

Jika tol tersambung dari Padang hingga Bukittinggi, lanjut Zefnihan, akan dapat mengurai kemacetan dan memudahkan pengunjung melewati rute tersebut. “Tujuannya memang untuk menguatkan ekonomi dengan melancarkan jalur logistik, ekonomi, dan pariwisata Sumbar,” ucapnya.

Gubernur Mahyeldi dalam rapat pendahuluan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026), meminta agar seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi.

“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” ujar Mahyeldi, dalam siaran pers, Kamis lalu.

Mahyeldi melanjutkan, pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi sebenarnya telah direncanakan sejak 2024. Maka, rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung penyelesaian proyek tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin, dalam rapat itu, menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar komitmen administratif.

“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” ucapnya.

Muhibuddin juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, Muhibuddin menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.

“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujar Muhibuddin.